

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan anak Perspektif Siyasah Tanfidziyah*”. Penelitian ini ditulis oleh Husnaini Asti Sagala, NIM 1321039, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, tahun 1447 H/2026 M.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Selatan yang menjadi permasalahan sosial yang mendesak untuk segera ditangani. Meskipun Pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, serta faktor budaya yang cenderung menutup-nutupi kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu: bagaimana implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Penyelenggaraan Penanganan dan Perlindungan anak dari kekerasan seksual di Aceh Selatan, dan bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah terhadap efektifitas qanun tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 dalam penyelenggaraan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan cara melakukan survey kelapangan. Menggunakan pendekatan kualitatif yakni metode penelitian yang menekankan pada kedalaman pemahaman terhadap masalah sosial yang dihadapi manusia. Pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif yaitu penelitian dengan mengumpulkan kata-kata dari informan, dokumen, dan hasil observasi dengan tujuan menggambarkan tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap anak di Aceh Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak tentunya belum mencerminkan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Berdasarkan permasalahan yang ada, masih banyak ditemukan kasus seperti kasus kekerasan yang tidak sampai pada proses hukum karena adanya tekanan sosial, lemahnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan fasilitas, pelaksanaan program perlindungan yang bersifat reaktif, lemahnya kapasitas lembaga perlindungan anak.

Kata Kunci: Qanun Aceh, Kekerasan Seksual, Siyasah Tanfidziyah